

1. Perlu memperketat pengawasan terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol secara berkala oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak ada ruang bagi para oknum-oknum ilegal.
2. Perlu menindak tegas hukuman bagi para oknum-oknum ilegal dan perlu menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi para perajin alkohol yang masih nekat mengedarkan ciu selain ke perusahaan yang membutuhkan ciu sebagai bahan produksinya.
3. Perlu meningkatkan penegakan hukum berkelanjutan terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Depdikbud, cet II, 1989)

Basah Sjachran, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH UNAIR, 1995)

- Fachruddin Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004)
- Hadjon Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)
- Hadjon Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuruduka, 1993)
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, cetakan II, 2010)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2009)
- Kasiram H. Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Marbun SF., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997)
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Muslimin Amrah, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985)
- Nur Diantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999)
- Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

- Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1983)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003)
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Sunindhia Y.W, *Praktek Penyelegaraan Pemerintahan di Daerah*,(Jakarta: Bina Aksara, 1996)
- Sutedi Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2018)
- Suriasumantri Jujur S., *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, (Jakarta: Gramedia, 1986)
- Syafrudin Ateng, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV*,(Bandung: Universitas Parahyangan, 2000)
- Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transpansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta. 2014)
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2005)

Winarsih Atik Septi dan Ratminto, *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan ke IX, 2012)

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

terhadap Perdagangan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M.DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Jurnal, Karya Ilmiah, dan lain-lain

- Adiyanta, F.C. Susila, 2010, *Jurnal Audit Mutu Hukum Peraturan Daerah: Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penanaman Modal dan Daya Saing Investasi*, Vol. 39 Nomor 1, Universitas Diponegoro, Semarang
- Adiyanta, F.C. Susila, 2018, *Jurnal Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah*, Vol. 1 Edisi 3, Universitas Diponegoro, Semarang
- Andriyani, Lusi, 2017, *Jurnal Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013*, Vol. 15 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah, Jakarta
- Pratiwi Yulia, 2011, *Tugas Akhir Pengaruh Keberadaan Industri Alkohol di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Terhadap Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Jumlah Unit Usaha Industri Besar, Menengah dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo menurut Golongan Industri, 2014 - 2015*. 8 Desember 2016. Diakses pada tanggal 5 Maret 2019 dari <https://sukoharjokab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, *Nilai Investasi Industri Besar, Menengah, dan Kecil, 2014-2015*. 8 Desember 2016. Diakses pada tanggal 5 Maret 2019 dari <https://sukoharjokab.bps.go.id>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,
Pedoman Perizinan Usaha melalui Sistem OSS versi 1.5. Jakarta
2018. Diakses pada tanggal 21 Februari 2019 dari
<https://www.oss.go.id>

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, *Geografis Kabupaten Sukoharjo*.
Diakses pada tanggal 22 Januari 2019 dari
<https://portal.sukoharjokab.go.id/>

BRILIO.NET, (2018, 25 Juli), Ciu Bekonang Miras Lokal ‘Sejuta Umat’
Asli Sukoharjo. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018,
dari <https://www.brilio.net/creator/ciu-bekonang-miras-lokal-sejuta-umat-asli-sukoharjo-071173.html>

RMOL JATENG, (2018, 26 Juli), Polres Sukoharjo Grebek Pabrik Miras
Oplosan. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2018,
dari <http://www.rmoljateng.com/read/2018/07/26/8976/Polres-Sukoharjo-Grebek-Pabrik-Miras-Oplosan-Bermerek->

Chemistry education and religious sharing, (2017, 15 April), Industri
Alkohol Bekonang Proses Pembuatan Penggunaan Air dan
Pengelolaan Limbah. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2018,
dari <http://nurudinmz.blog.uns.ac.id/2017/04/15/industri-alkohol-bekonang-proses-pembuatan-penggunaan-air-dan-pengolahan-limbah/>

